



# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1187/VII-13/0523  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Sertifikat Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

Gresik, 10 Mei 2023

Yth. Pimpinan Badan Usaha/ Faskes Provider  
Peserta JKN  
di  
Gresik dan Lamongan

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehubungan dengan penerbitan sertifikat kepesertaan JKN BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Badan usaha yang sudah menjadi peserta dan mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), maka bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbitan sertifikat sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan dari Badan Usaha yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang diberikan kuasa minimal setingkat *Manager* di atas materai 10.000 bahwa sudah mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya menjadi peserta program JKN-KIS dengan format terlampir
2. Bukti pembayaran iuran bulan berjalan dan tidak ada tunggakan iuran
3. Bukti pemotongan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 terbaru

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala



Janoe Tegoeh Prasetyo

Tembusan Yth :  
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lamongan

FI/np/PS00.00

## Kantor Cabang Gresik

Ruko Green Garden Blok A5 No.32-34  
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo  
Gresik 61121-Jawa Timur  
Telp. (031)99104911  
kc-gresik@bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

# KOP SURAT PERUSAHAAN

## SURAT PERNYATAAN UNTUK PERMOHONAN SERTIFIKAT KEPESERTAAN JKN KIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Badan Usaha : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sudah mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarga dari PT/CV ..... menjadi peserta Program JKN KIS dengan rincian sebagai berikut :

No	Data Badan usaha	Jiwa	Peserta Terdaftar pada Program JKN KIS	Jiwa
1	Jumlah Karyawan		Jumlah Karyawan	
2	Jumlah Anggota Keluarga		Jumlah Anggota Keluarga	
3	Total		Total	

2. Sudah mendapatkan Nomor Virtual Account / Kode Badan Usaha dari BPJS Kesehatan
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kepatuhan BPJS Kesehatan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

.....  
Disetujui untuk diproses  
dengan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan.  
Kepala Cabang BPJS Kesehatan

.....  
Pimpinan Badan Usaha

Materai 10.000

Janoë Tegoeh Prasetijo

.....

# KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lamp : .....  
Perihal : Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat

Yth. Kepala Kantor Cabang .....  
BPJS Kesehatan  
di  
.....

Bersama ini kami mohon bantuan BPJS Kesehatan untuk dapat menerbitkan sertifikat keikutsertaan PT. .... menjadi peserta JKN KIS.  
Berikut kami lampirkan Surat Pernyataan sebagai dasar pertimbangan penerbitan Sertifikat Kepesertaan JKN KIS.



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Badan Usaha  
PT.....

.....  
Jabatan : .....

# Contoh Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPh Pasal 21

area staples

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b>	 <b>FORMULIR 1721</b>
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	area barcode
MASA PAJAK : (mm - yy)	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISIOLAH PETUGAS)
<input type="checkbox"/> SPT NORMAL	<input type="checkbox"/> SPT PEMBEHALAN KE-	<input type="checkbox"/>

## A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :

2. NAMA :

3. ALAMAT :

4. NO. TELEPON :  5. EMAIL :

## B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOYONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKTIVITAS BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DAN PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PEMERIMA PENGHASILAN YANG DIPOYONG PPh PASAL 21 TIDAK RYAL LAINYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 SD. 10)				
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR</b>					<b>JUMLAH (Rp)</b>
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0,0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASAPAJAK <input type="text"/>				0,0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0,0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KURUS - ANGKA 14)				0,0
<i>LANJUTAN PENGISIAN PADA ANGKA 15 &amp; 17 APABILA SPT PEMBEHALAN ATAU PADA ANGKA 16 APABILA PPh LEBIH DISETOR</i>					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN BANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0,0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEHALAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0,0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0,0